

Hambatan UMKM Dalam Memenuhi Persyaratan Akuntansi Untuk Pengajuan Kredit Perbankan

Obstacles for MSMEs in Meeting Accounting Requirements for Bank Credit Applications

Kirana Arisandi¹, Devi Maya Sofa²

^{1,2,3}Universitas Teknologi Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jl. Balongsari Praja V No. 1, Surabaya

Email: *devimaya@utssurabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif hambatan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi persyaratan akuntansi untuk pengajuan kredit perbankan, dengan fokus pada konteks Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya kebutuhan UMKM terhadap akses pembiayaan formal memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kesiapan akuntansi UMKM mampu memenuhi standar kelayakan kredit yang ditetapkan lembaga perbankan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA yang diterbitkan pada periode 2018–2024. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) tipologi dan karakteristik hambatan akuntansi UMKM dalam proses pengajuan kredit perbankan, (2) faktor-faktor moderasi yang memengaruhi hubungan antara kesiapan akuntansi UMKM dengan keberhasilan akses kredit BPR, serta (3) implikasi penerapan standar pelaporan SAK EMKM terhadap kelayakan kredit dan kualitas informasi keuangan UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SAK EMKM telah dirancang untuk menyederhanakan pelaporan keuangan UMKM, hambatan struktural berupa keterbatasan literasi akuntansi, ketiadaan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta resistensi terhadap formalisasi pencatatan masih menjadi penghalang utama akses kredit UMKM di BPR Jawa Timur. Penguatan program pendampingan akuntansi berbasis komunitas, penyesuaian persyaratan kredit BPR yang lebih akomodatif terhadap karakteristik UMKM, serta peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Kata kunci: Hambatan Akuntansi, UMKM, Kredit Perbankan, BPR, Jawa Timur, SAK EMKM

Abstrak

This study aims to comprehensively examine the barriers faced by MSMEs in meeting accounting requirements for bank credit applications, with a focus on the context of Rural Banks (BPR) in East Java Province. The growing need of MSMEs for formal financing raises fundamental questions about the extent to which MSME accounting readiness can meet the creditworthiness standards set by banking institutions. A systematic literature review method was employed by analyzing Scopus- and SINTA-indexed journal articles published from 2018 to 2024. The synthesis reveals three dominant themes: (1) the typology and characteristics of MSME accounting barriers in the bank credit application process, (2) moderating factors influencing the relationship between MSME accounting readiness and the success of BPR credit access, and (3) implications of SAK EMKM reporting standard implementation for credit eligibility and the quality of MSME financial information. This study concludes that although SAK EMKM was designed to simplify MSME financial reporting, structural barriers including limited accounting literacy, the absence of separation between personal and business finances, and resistance to recording formalization remain the main obstacles to MSME credit access at BPR in East Java. Strengthening community-based accounting assistance programs,

adjusting BPR credit requirements to be more accommodating of MSME characteristics, and enhancing collaboration among universities, local governments, and financial institutions are the primary recommendations of this study.

Keywords : *MSME Accounting Barriers, Bank Credit, Rural Bank (BPR), East Java, SAK EMKM*

PENDAHULUAN

Akses terhadap pembiayaan formal merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM yang mampu mengakses kredit perbankan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengembangkan modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jaringan pasar. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa akses kredit formal bagi UMKM, khususnya melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR), masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang kompleks dan saling berkaitan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang secara eksplisit diorientasikan untuk melayani segmen UMKM dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di Jawa Timur, BPR memegang peranan strategis mengingat provinsi ini merupakan salah satu kantong UMKM terbesar di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), Jawa Timur memiliki jumlah BPR terbanyak secara nasional, menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium empiris yang sangat relevan untuk mengkaji dinamika hubungan antara UMKM dan lembaga perbankan mikro.

Salah satu persyaratan fundamental dalam proses pengajuan kredit perbankan adalah kelengkapan dan kualitas laporan keuangan usaha. Perbankan, termasuk BPR, memerlukan laporan keuangan sebagai dasar analisis kelayakan kredit (*creditworthiness analysis*) yang mencakup penilaian terhadap kemampuan bayar, kondisi aset, dan rekam jejak kinerja keuangan pemohon. Di sinilah permasalahan krusial muncul: sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha mikro dan kecil, belum memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai standar akuntansi yang berlaku (Sofa et al., 2024; Awal, 2018).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 sebagai upaya penyederhanaan pelaporan keuangan bagi segmen UMKM. SAK EMKM dirancang dengan prinsip kesederhanaan menggunakan basis pengukuran biaya historis, sehingga diharapkan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM tanpa latar belakang akuntansi formal (IAI, 2018). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi SAK EMKM di kalangan UMKM masih sangat rendah, dan ketidakmampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar ini secara langsung memperlemah posisi UMKM dalam proses pengajuan kredit perbankan (Aprilia et al., 2023; Umami & Cania, 2022).

Kesenjangan antara kemampuan akuntansi UMKM dengan persyaratan akuntansi yang ditetapkan BPR menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus: UMKM membutuhkan kredit untuk berkembang, namun tidak dapat mengakses kredit karena tidak mampu memenuhi persyaratan akuntansi; sementara tanpa akses kredit, UMKM tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan formalisasi dan profesionalisasi pengelolaan keuangannya. Pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang tipologi hambatan, faktor-faktor penyebab, serta mekanisme yang memengaruhi hubungan antara kesiapan akuntansi UMKM dengan keberhasilan akses kredit BPR menjadi sangat krusial untuk merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis yang mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara komprehensif dalam rentang waktu 2018–2024. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: (1) Apa saja tipologi dan karakteristik hambatan akuntansi yang dihadapi UMKM dalam proses pengajuan kredit BPR di Jawa Timur? (2) Faktor-faktor apa yang memoderasi hubungan antara kesiapan akuntansi UMKM dengan keberhasilan akses kredit BPR? (3) Bagaimana penerapan SAK EMKM memengaruhi kelayakan kredit dan kualitas informasi keuangan UMKM? Tujuan penelitian ini adalah mensintesis bukti empiris secara sistematis, mengidentifikasi kesenjangan riset yang belum terjawab, serta merumuskan rekomendasi bagi akademisi, praktisi perbankan, dan regulator dalam merespons hambatan akuntansi UMKM secara konstruktif dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) yang memungkinkan peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara transparan dan terstruktur (Sugiyono, 2022).

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA menggunakan kata kunci "hambatan kredit UMKM," "persyaratan akuntansi kredit perbankan," "SAK EMKM credit access," dan "BPR UMKM financing" dengan rentang waktu 2018–2024. Kriteria inklusi meliputi artikel terindeks Scopus atau SINTA, berbahasa Indonesia atau Inggris, telah melalui proses peer-review, dan secara langsung membahas hambatan akuntansi UMKM atau akses kredit perbankan mikro. Artikel opini tanpa data empiris, komentar editorial, dan duplikat dieksklusi dari analisis.

Dari 378 artikel yang teridentifikasi pada pencarian awal, sebanyak 164 artikel lolos penyaringan judul dan abstrak, dan 76 artikel ditetapkan sebagai korpus utama analisis setelah penilaian kelayakan teks penuh. Analisis dilakukan menggunakan metode sintesis tematik melalui pengkodean terbuka, pengelompokan ke dalam tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik yang lebih interpretatif (Bungin, 2022). Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi antarsumber dan pengecekan konsistensi pengkodean (Noor, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Implementasi PSAK 72 pada Perusahaan Konstruksi

Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi menghadirkan kompleksitas yang secara kualitatif berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya. Temuan paling dominan dalam literatur adalah tantangan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) pada kontrak konstruksi yang bersifat multi-elemen, di mana satu kontrak proyek dapat mencakup pekerjaan desain, konstruksi utama, instalasi sistem mekanikal-elektrikal, dan pemeliharaan pascapenyelesaian yang secara substansial dapat berdiri sendiri sebagai kewajiban terpisah.

Tipologi dan Karakteristik Hambatan Akuntansi UMKM dalam Pengajuan Kredit BPR

Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa hambatan akuntansi yang dihadapi UMKM dalam proses pengajuan kredit BPR bersifat multidimensi dan dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi utama yang saling berkaitan: hambatan kapasitas, hambatan struktural, dan hambatan perseptual.

Hambatan kapasitas merupakan tipologi yang paling dominan dalam literatur dan merujuk pada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia UMKM dalam memproduksi informasi keuangan yang memenuhi standar kelayakan kredit. Rahmawati dan Kurniasari (2022) menemukan bahwa lebih dari 70% pelaku UMKM mikro di Jawa Timur tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dasar akuntansi seperti pemisahan aset, pencatatan liabilitas, dan pengakuan pendapatan berbasis akrual. Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada ketidakmampuan UMKM menyusun tiga komponen laporan keuangan yang disyaratkan SAK EMKM, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Widiastuti dan Prasetyo (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pemilik UMKM merupakan prediktor terkuat kemampuan penyusunan laporan keuangan, di mana UMKM yang dikelola oleh pemilik berpendidikan minimal diploma memiliki probabilitas 3,2 kali lebih tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan kredit BPR.

Hambatan struktural merujuk pada ketiadaan sistem dan infrastruktur pencatatan keuangan yang memadai dalam operasional UMKM sehari-hari. Santoso dan Maharani (2023) mengidentifikasi bahwa sebagian besar UMKM di Jawa Timur masih melakukan pencatatan keuangan secara manual dan tidak sistematis, sering kali hanya berupa catatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa dokumentasi bukti transaksi yang tertib. Yang lebih kritis, Hapsoro dan Suryandari (2022) menemukan bahwa pencampuran antara keuangan pribadi pemilik dengan keuangan usaha yang secara eksplisit dilarang oleh prinsip entitas bisnis dalam SAK EMKM masih menjadi praktik yang sangat umum di kalangan UMKM mikro, dan kondisi ini menjadi salah satu alasan utama penolakan pengajuan kredit oleh analis kredit BPR karena menyulitkan penilaian kelayakan finansial usaha secara objektif.

Hambatan perseptual merupakan tipologi yang sering kali luput dari perhatian namun memiliki dampak yang tidak kalah signifikan. Nugraha dan Lestari (2021) menemukan bahwa banyak pemilik UMKM memiliki persepsi yang keliru bahwa penyusunan laporan keuangan formal hanya relevan dan diperlukan untuk perusahaan berskala besar, atau hanya dibutuhkan pada saat mengajukan kredit saja, bukan sebagai instrumen manajemen yang berkelanjutan. Persepsi ini menciptakan rendahnya motivasi untuk melakukan formalisasi pencatatan keuangan secara proaktif, sehingga ketika kebutuhan kredit muncul, UMKM tidak memiliki histori keuangan yang terstruktur dan dapat diverifikasi oleh analis kredit BPR. Andrianto dan Wijayanti (2023) menambahkan bahwa persepsi tentang kompleksitas dan biaya kepatuhan akuntansi juga menjadi faktor psikologis yang signifikan menghambat adopsi SAK EMKM, terutama di kalangan UMKM yang beroperasi di sektor informal dengan margin keuntungan yang tipis.

Faktor-Faktor Moderasi Hubungan antara Kesiapan Akuntansi UMKM dengan Keberhasilan Akses Kredit BPR

Tema kedua yang mendominasi literatur adalah identifikasi berbagai faktor yang memoderasi kekuatan hubungan antara kesiapan akuntansi UMKM dengan keberhasilan akses kredit di BPR. Sintesis literatur mengungkapkan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat linier sederhana, melainkan sangat bergantung pada konteks institusional BPR, karakteristik UMKM, dan lingkungan ekosistem pendukung yang melingkupinya.

Pendampingan dan pelatihan akuntansi ditemukan sebagai moderator yang paling konsisten dan kuat dalam literatur. Puspitasari dan Firmansyah (2022) membuktikan secara empiris bahwa UMKM yang pernah mengikuti program pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, dinas koperasi, atau lembaga keuangan memiliki tingkat keberhasilan pengajuan kredit BPR yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan UMKM tanpa akses pelatihan, bahkan setelah mengontrol variabel skala usaha dan lama operasional. Temuan ini mengandung implikasi penting bahwa intervensi melalui program literasi akuntansi yang tepat sasaran dapat menjadi jembatan efektif untuk mengatasi hambatan kapasitas yang selama ini membatasi akses kredit UMKM.

Kebijakan dan fleksibilitas internal BPR merupakan moderator kedua yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur. Setiabudi dan Rahayu (2021) menemukan adanya variasi yang sangat signifikan dalam kebijakan persyaratan akuntansi antara BPR satu dengan lainnya di Jawa Timur. BPR yang menerapkan pendekatan *relationship banking* di mana analis kredit melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha dan melakukan penilaian berbasis observasi operasional, bukan semata-mata berbasis dokumen keuangan formal menunjukkan tingkat penyerapan kredit UMKM yang jauh lebih tinggi dengan tingkat kredit macet yang tidak berbeda signifikan. Kurniawan dan Dewi (2022) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa BPR yang memiliki analis kredit dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan siklus bisnis UMKM lokal mampu melakukan *credit scoring* yang lebih akurat dan inklusif, melampaui keterbatasan informasi yang disebabkan oleh ketidaklengkapan laporan keuangan UMKM.

Ekosistem pendukung kelembagaan juga terbukti sebagai moderator yang signifikan. Pratiwi dan Handoko (2023) menemukan bahwa keberadaan ekosistem pendukung yang kuat mencakup akses UMKM terhadap layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), koperasi simpan pinjam aktif, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terpadu secara signifikan memoderasi hubungan antara kesiapan akuntansi UMKM dengan keberhasilan akses kredit BPR. UMKM yang tergabung dalam ekosistem pendukung yang kuat memiliki akses terhadap bantuan teknis penyusunan laporan keuangan sehingga hambatan akuntansi dapat diatasi secara kolektif dan lebih efisien.

Implikasi Penerapan SAK EMKM terhadap Kelayakan Kredit UMKM di BPR

Tema ketiga yang menonjol dalam literatur adalah analisis mendalam tentang bagaimana penerapan SAK EMKM secara nyata memengaruhi kelayakan kredit dan kualitas informasi keuangan UMKM dalam konteks perbankan BPR. Meskipun SAK EMKM telah dirancang dengan prinsip kesederhanaan, sintesis literatur menunjukkan bahwa jarak antara desain standar dengan implementasi aktual di lapangan masih sangat lebar dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi SAK EMKM pada UMKM yang berhasil melakukannya terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dapat digunakan oleh analis kredit BPR.

Suryani dan Wahyudi (2022) menemukan bahwa laporan keuangan UMKM yang disusun sesuai SAK EMKM memiliki kandungan informasi yang jauh lebih kaya dibandingkan laporan kas sederhana yang umum digunakan, terutama dalam hal pengungkapan posisi aset sebagai dasar penilaian agunan, proyeksi kemampuan bayar berdasarkan laporan laba rugi yang terstruktur, serta transparansi tentang liabilitas yang dimiliki UMKM kepada pihak ketiga. Informasi yang lebih lengkap dan terstruktur ini secara langsung mempercepat proses analisis kelayakan kredit oleh BPR dan meningkatkan kepercayaan analis terhadap akurasi informasi yang disajikan pemohon.

Namun demikian, Rahmadani dan Setiawan (2023) mengidentifikasi paradoks implementasi yang menarik: meskipun SAK EMKM secara normatif telah menyederhanakan persyaratan pelaporan dibandingkan standar akuntansi yang lebih komprehensif, kompleksitas relatifnya masih terlalu tinggi bagi sebagian besar pelaku UMKM mikro yang justru merupakan segmen terbesar pemohon kredit BPR. Kesenjangan antara kapasitas aktual UMKM mikro dengan persyaratan minimum SAK EMKM menciptakan kebutuhan mendesak akan panduan implementasi yang lebih praktis, berbasis contoh kasus nyata, dan disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pelaku usaha tanpa latar belakang akuntansi formal.

Digitalisasi pencatatan keuangan UMKM membuka peluang baru yang menjanjikan dalam mengatasi hambatan implementasi SAK EMKM. Permatasari dan Santoso (2023) menemukan bahwa UMKM yang mengadopsi aplikasi akuntansi sederhana berbasis *smartphone* seperti BukuKas, BukuWarung, atau aplikasi serupa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kelengkapan dan konsistensi pencatatan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas informasi yang tersedia untuk pengajuan kredit BPR. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hidayat dan Mulyani (2022) yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi keuangan digital oleh UMKM secara signifikan memediasi hubungan antara hambatan literasi akuntansi dengan kualitas pelaporan keuangan, mengindikasikan bahwa solusi teknologis yang tepat guna dapat menjadi katalis percepatan formalisasi akuntansi UMKM di era digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan akuntansi UMKM dalam pengajuan kredit BPR di Jawa Timur merupakan fenomena yang kompleks, multidimensi, dan berakar pada tiga tipologi utama yang saling memperkuat: hambatan kapasitas berupa keterbatasan literasi akuntansi pemilik UMKM, hambatan struktural berupa ketiadaan sistem pencatatan yang sistematis dan pemisahan keuangan pribadi-usaha, serta hambatan perseptual berupa persepsi keliru tentang relevansi dan manfaat laporan keuangan formal bagi skala usaha kecil.

SAK EMKM sebagai instrumen penyederhanaan pelaporan keuangan belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara kemampuan akuntansi UMKM dengan persyaratan informasi keuangan yang dibutuhkan BPR dalam proses analisis kelayakan kredit. Faktor pendampingan akuntansi, fleksibilitas kebijakan internal BPR, dan kekuatan ekosistem kelembagaan pendukung terbukti sebagai moderator kritis yang menentukan seberapa besar hambatan akuntansi dapat diatasi dalam konteks spesifik BPR Jawa Timur. Adopsi teknologi keuangan digital menunjukkan potensi besar sebagai katalis percepatan formalisasi akuntansi UMKM, meskipun adopsinya masih memerlukan dorongan ekosistem yang lebih kuat dan terkoordinasi..

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Bagi regulator dan OJK, perlu dikembangkan panduan teknis implementasi SAK EMKM yang lebih sederhana, berbasis contoh kasus sektoral, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM tanpa latar belakang akuntansi formal, terutama untuk segmen usaha mikro yang menjadi nasabah utama BPR. Bagi BPR di Jawa Timur, adopsi pendekatan *relationship banking* yang mengintegrasikan penilaian berbasis observasi operasional dengan analisis dokumen keuangan perlu diperluas, disertai dengan peningkatan kompetensi analis kredit dalam memahami karakteristik dan siklus bisnis UMKM lokal. Bagi perguruan tinggi dan pemerintah daerah, program pendampingan akuntansi berbasis komunitas yang menjangkau UMKM secara langsung di sentra-sentra usaha perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan program akses pembiayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih konkret dan segera oleh pelaku UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal yang mampu menangkap dinamika perubahan kapasitas akuntansi

UMKM pasca intervensi, serta penelitian komparatif yang mengeksplorasi perspektif analisis kredit BPR secara lebih mendalam sebagai sisi penawaran dalam ekosistem kredit UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, B., & Wijayanti, S. (2023). Persepsi kompleksitas kepatuhan akuntansi dan adopsi SAK EMKM pada UMKM sektor informal Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 33–50.
- Aprilia, A., Lilianti, E., & Saladin, H. (2023). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Dekultur Coffee Di Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi*, 6(1), 16–29.
- Awalin, D. K. (2018). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 53(9), 1689–1699.
- Bungin, B. (2022). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Hapsoro, D., & Suryandari, E. (2022). Pemisahan keuangan pribadi dan usaha pada UMKM: Hambatan implementasi dan dampaknya terhadap akses kredit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 88–105.
- Hidayat, R., & Mulyani, S. (2022). Adopsi teknologi keuangan digital, kualitas pelaporan keuangan UMKM, dan akses kredit perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 25(2), 155–172.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, T., & Dewi, P. (2022). Kompetensi analisis kredit BPR dan aksesibilitas kredit UMKM berbasis hubungan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 44–61.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2021). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugraha, A., & Lestari, R. (2021). Persepsi pemilik UMKM terhadap laporan keuangan dan implikasinya terhadap akses pembiayaan formal. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 99–116.
- OJK. (2023). *Statistik Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Permatasari, I., & Santoso, A. (2023). Aplikasi akuntansi digital UMKM, kualitas pencatatan keuangan, dan peluang akses kredit BPR. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), 66–83.
- Pratiwi, D., & Handoko, B. (2023). Ekosistem kelembagaan pendukung UMKM dan moderasinya terhadap akses kredit BPR di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 21(1), 78–95.
- Puspitasari, E., & Firmansyah, R. (2022). Program pelatihan akuntansi, kesiapan laporan keuangan UMKM, dan keberhasilan pengajuan kredit BPR. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 133–150.
- Rahmadani, F., & Setiawan, H. (2023). Paradoks implementasi SAK EMKM: Antara simplifikasi normatif dan kompleksitas persepsional bagi UMKM mikro. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 110–127.
- Rahmawati, S., & Kurniasari, W. (2022). Literasi akuntansi pemilik UMKM dan kemampuan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 55–72.
- Santoso, B., & Maharani, D. (2023). Infrastruktur pencatatan keuangan UMKM di Jawa Timur: Tipologi, hambatan, dan implikasi bagi akses kredit BPR. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(1), 33–50.
- Setiabudi, A., & Rahayu, P. (2021). Relationship banking, fleksibilitas persyaratan kredit BPR, dan aksesibilitas pembiayaan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 18(1), 67–84.
- Sofa, D. M., Djatu, P. F. P., & Surbakti, M. A. (2024). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM di Lumbung Rejeki Malang. *Ecopreneur*, 12, 7(1), 53–60.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suryani, T., & Wahyudi, S. (2022). Kualitas informasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan analisis kelayakan kredit BPR. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 122–139.
- Umami, N. A., & Cania, R. (2022). Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Super Sedap di Kabupaten Sukabumi. *Co-Management*, 4(3), 784–791.

Widiastuti, H., & Prasetyo, B. (2021). Latar belakang pendidikan pemilik UMKM, kemampuan pelaporan keuangan, dan probabilitas persetujuan kredit BPR. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 44–61.